

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian dengan judul Implementasi Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 tentang “Baling Bambu sebagai strategi Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tahun 2023, dengan mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan tersebut. Data dan temuan pada penelitian ini dianalisis secara mendalam melalui model pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan agar dapat menjadi konstruktif dan bahan evaluasi bagi penyempurnaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kemudian hari. Pada bab ini telah dipaparkan secara komprehensif terkait kondisi empirik yang mencerminkan pelaksanaan Program Baling Bambu.

Implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagai pisau analisis untuk mengupas bagaimana penerapan Program Baling Bambu dengan menggunakan tiga komponen variabel utama, yaitu : (1). Mudah atau tidaknya masalah yang di garap, (2). Kemampuan kebijakan untuk membangun proses implementasi secara tepat, dan (3). Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, kajian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana kebijakan Baling Bambu dijalankan sesuai dengan rancangan awal dan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dalam menentukan keberhasilan dan menemukan kendala pada proses implementasi program.

Berdasarkan studi kebijakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Wali Kota Bukittinggi mengenai Baling Bambu sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Bukittinggi belum dikatakan optimal. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan terdapat beberapa kendala yang membuat kebijakan tersebut belum efektif dalam hal struktural maupun pelaksanaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa :

- (1) Permasalahan teknis dan struktural yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Baling Bambu. Seperti belum terbentuknya pemberdayaan keluarga *pioneer* dan komunitas formal yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat.
- (2) Keterbatasan data dan kapasitas yang menyebabkan inkonsistensi dan ketidaktepatan sasaran, hal ini mengakibatkan program belum dikatakan efektif secara menyeluruh dalam menjangkau kelompok sasaran.
- (3) Minimnya koordinasi yang terjalin antara *stakeholder* baik itu secara administratif dan operasional berupa pelaporan, isi kebijakan yang berbeda dengan penerapan di lapangan seperti diskusi antar *stakeholder*, pertemuan rutin, hingga adanya monitoring dan evaluasi bersama.
- (4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program yang mengindikasikan lemahnya komunikasi dan koordinasi. Hal ini menyebabkan resistensi dalam pelaksanaan program Baling Bambu dan menyebabkan masyarakat menjadi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
- (5) Penghentian operasional sementara disebabkan beberapa kendala seperti minimnya sumber daya manusia dan anggaran serta pergantian kepala

daerah yang membuat arah kebijakan harus mengalami penyesuaian kembali.

- (6) Diperlukannya revisi dalam struktur pelaksanaan dan skema Program Baling Bambu terkhusus pada optimalisasi keberadaan keluarga *pioneer*. Pada temuan yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa masih terdapat penyesuaian program dengan perspektif dan kondisi mereka. minimnya pelatihan, dan kejelasan aturan dan tugas, serta wadah formal yang belum ada untuk menampung aspirasi mereka menjadi salah satu hambatan teknis yang memberikan dampak pada rendahnya efektivitas pendistribusian bantuan secara merata.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, membantahkan asumsi awal penelitian yang mengatakan bahwa implementasi berjalan dengan baik dan optimal di lapangan. Dalam proses pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan substansial yang menjadi hambatan dalam pemenuhan efektivitas kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Baling Bambu belum secara keseluruhan mampu menjawab tantangan pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Walaupun kebijakan ini disusun secara struktural melalui pendekatan partisipatif, namun nyatanya masih memperlihatkan bahwa proses implementasi masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada pencapaian hasil kebijakan yang belum optimal.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan dari hasil analisis data pada penelitian implementasi Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor

188.45-210-2023 tentang “Baling Bambu” sebagai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tahun 2023, maka peneliti memberikan saran untuk mengembangkan penelitian ini bagi peneliti berikutnya secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier. Hasil dari temuan dan analisis yang peneliti peroleh khususnya pada dimensi politik terdapat beberapa permasalahan seperti ditemukannya dinamika dan komitmen aktor pelaksana yang masih belum berjalan dengan sinergis. Hal ini terlihat dari kurangnya optimalisasi dukungan politik terhadap integrasi antar berbagai pihak yang tercakup dalam surat keputusan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan rancangan awal pembentukan Program Baling Bambu. Kajian ini menarik untuk diteliti dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya dengan mengkaji evaluasi dari kebijakan tersebut.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan saran terhadap hasil implementasi Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023 tentang “Baling Bambu” sebagai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tahun 2023 diantaranya :
 - (1) Dibutuhkannya pemberdayaan masyarakat *pioneer* dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan yang mendalam terkait Program Baling Bambu. Pemerintah harus memperkuat pembentukan kelompok atau

komunitas keluarga *pioneer* dan memastikan pendampingan yang lebih intensif dalam keberlanjutan program.

- (2) Pemerintah harus meningkatkan sistem manajemen data dan memperbaiki kembali mekanisme pengumpulan data yang lebih terstruktur dan akurat.
- (3) *Stakeholder* diharapkan dapat membantu dalam penyediaan data yang relevan dan akurat, serta dapat berpartisipasi dalam evaluasi perbaikan pengumpulan data tersebut.
- (4) Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang menjadi fasilitator dalam kebijakan ini harus mampu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* dengan mengadakan pertemuan rutin untuk menciptakan sinergitas yang lebih kuat dalam keberlanjutan program.
- (5) Masyarakat diharapkan dapat memahami dengan baik tentang tujuan jangka panjang pada Program Baling Bambu serta manfaat kedepannya demi memperbaiki perekonomian masyarakat atau kelompok sasaran.
- (6) Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi yang intens termasuk pendekatan kepada kelompok sasaran agar masyarakat memahami tujuan dan menghindari penyalahgunaan bantuan.
- (7) *Stakeholder* diharapkan mampu untuk menyebarluaskan informasi secara aktif terkait Program Baling Bambu dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman kelompok sasaran.

- (8) *Stakeholder* harus dilibatkan dalam dialog terbuka mengenai kendala dalam pelaksanaan program agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami alasan dibalik penghentian operasional sementara pada Program Baling Bambu.
- (9) Pemerintah harus memastikan adanya kebijakan yang jelas terkait kesinambungan operasional program, dengan menata ulang anggaran dan sumber daya, untuk menjaga stabilitas keberlangsungan program dalam jangka panjang.

